



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDHIKA PARATAMA HERLAMBANG**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **734255**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	15.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 6.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 2.000.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 6.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	630.000.000
1. MOBIL, TOYOTA SUV Tahun 2019, WARISAN Rp. 300.000.000		
2. MOTOR, HD SOFTAIL Tahun 1989, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000		
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	127.057.949
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	15.763.557.949
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.763.557.949

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.